

Kritik atas Determinisme dalam Model Transisi Demokrasi

Oleh:
Nanto Sriyanto

Abstract

Democratization has spilled over to many new transitional countries. Democratization is a model firstly stated by Rustow in 1970's to distinguish it from democracy. The Model assumes that genesis and function of democracy is different. The model emphasizes dynamic role of strategic actors or elite to promote democratization through bargaining process. Since then, the model has been modified with some ad hoc argument taken from new evidences. Since the model only give emphasize to dynamic role of strategic actors, it has produce deterministic conclusion. The determinism of the model is caused by disregard of structural and non-political factor. If the model is deterministic, can the liberal democracy that taken as ideal purpose of democratic transition unbounded from determinism of the model? Is there another model of democracy that contains local aspect of many transition states?

Perubahan rejim di Eropa Timur telah banyak disebut sebagai sebuah kemenangan bagi demokrasi dan kebebasan. Antusiasme akan “demokrasi dan kebebasan” sedemikian besar hingga Fukuyama menyebutnya akhir dari sebuah sejarah dengan demokrasi liberal sebagai model tanpa tanding bagi perjalanan demokrasi¹. Namun fakta hanya sedikitnya negara yang “berhasil” dalam transisi hakikatnya memberi jawaban bahwa perubahan itu bukanlah bukti kemenangan. Sejumlah negara yang telah meninggalkan bentuk otoritarianisme ternyata masih jauh dari sebuah demokrasi, bahkan tanda-tanda surutnya demokrasi kembali ke bentuk otorititer masih terbuka.

Perkembangan tersebut menimbulkan kesangsian dari para pengamat akan muara dari kondisi yang masih jauh dari cerah ini. Jumlah negara yang memulai demokratisasi memang mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut masih dibarengi dengan kemandegan di beberapa kasus. Dasawarsa 90-an ditandai dengan gelombang perubahan rejim di Eropa

Timur ditangkap secara positif sebagai bagian dari gelombang demokrasi yang telah berlangsung sejak dasawarsa 70-an. Gelombang tersebut kini berada pada titik susut ketika kemandegan, bahkan kemunduran, ke arah rejim otoriter kembali terjadi.

Fenomena transisi menuju demokrasi ini dianggap sebagai sebuah rangkaian panjang yang telah terjadi dengan diawali perubahan sistem otoritarianisme di Eropa Selatan (Spanyol dan Portugal), Amerika Selatan, Amerika Tengah, hingga Asia Timur. Bila pada gelombang terdahulu faktor domestik begitu berperan, maka perubahan yang terjadi di Eropa Timur dan kemudian juga berimbas ke Indonesia merupakan sebuah bentuk baru dengan melihat besarnya pengaruh ekonomi politik internasional dalam perubahan rejim. Gelombang gerakan demokrasi yang mengubah rejim otoriter di berbagai belahan bumi berlangsung dalam rentang waktu yang panjang seiring dengan kemunculan sebuah model analisa transisi menuju demokrasi.

Perbedaan rentang waktu dengan segala kondisi aktual yang berbeda membuat sebuah kacamata analisa yang dikandung paradigma

¹ Francis Fukuyama, “The End of History” , *The National Interest* no. 16 (1989), 3-18

transisi demokrasi perlu untuk dikaji sesuai dengan perkembangan terkini. Kehancuran sistem ekonomi politik komunis yang membuat negara-negara Barat “mengekspor” demokrasi mendorong semakin meluasnya demokratisasi di berbagai belahan dunia. Upaya negara-negara Barat untuk menyebarluaskan demokratisasi tersebut diiringi dengan mengedepankan model demokrasi liberal sebagai model politik dan dibarengi dengan pengaitan bantuan ekonomi. Kapitalisme yang dikembangkan di negara-negara transisi diasumsikan akan menjadi faktor penekan bagi kembalinya sistem otoritarianisme dengan adanya tingkat kompetisi dan distribusi kemakmuran yang diatur oleh pasar. Pada kondisi demikian keterkaitan antara demokrasi dan ekonomi (kapitalisme) menjadi sebuah bagian dari rekayasa yang diterapkan di negara-negara yang tergolong dalam kelompok negara transisi. Faktor eksternal yang pada awal kemunculannya masih belum diperhatikan perlu ditempatkan lebih jelas sebagai faktor pendorong demokratisasi di era sekarang.

Selain faktor ekonomi, faktor kultural turut diperhatikan dalam pengembangan demokrasi pada era pergantian milenium. Kondisi kultural yang khas di masing-masing negara menjadi sebuah pertanyaan apakah kebudayaan dapat menjadi sebuah pendorong atau penghambat berkembangnya demokrasi. Meski relativisme budaya pernah menjadi sebuah sanggahan bagi universalitas demokrasi liberal dengan mencuatnya model demokrasi dengan latar nilai Asia (*Asian Values*) seperti yang pernah dikemukakan oleh negara di Asia Timur (dan juga Indonesia), pertanyaan tentang sejauh mana perimbangan lokalitas demokrasi perlu dikembangkan menjadi sebuah titik penting bagi perkembangan demokrasi di berbagai negara yang sedang mengalami transisi. Lokalitas yang berlaku khas di suatu negara mendorong sebuah pertanyaan atas model demokrasi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan negara yang sedang mengalami transisi. Hal ini

merupakan kritik eksternal bagi determinisme model demokrasi liberal yang diajukan oleh negara Barat.

Di samping faktor-faktor di atas yang tergolong sebagai kondisi mutakhir dan model lain dari demokrasi yang layak dikembangkan di negara transisi yang berguna dalam mempertanyakan model transisi menuju demokrasi, perlu diajukan kritik internal atas model tersebut. Kompatibilitas konsep model transisi menuju demokrasi perlu dikritisi fungsionalitasnya dalam memotret arah perubahan rejim. Apakah kecenderungan pola yang diajukan telah sedemikian tepat atau perlu dilihat kemungkinan perubahan arah dan kecenderungan lain yang mungkin berlaku. Termasuk di dalamnya konsekuensi kesimpulan dari model transisi menuju demokrasi yang menekankan pada dinamika politik dengan mengabaikan faktor struktural dan non-politik.

Ketiga hal di atas – kondisi mutakhir, kritik eksternal dan kritik internal- akan menjadi kajian yang mendasari uraian dalam tulisan ini. Dengan menimbang ketiga hal tersebut dapat dilihat aktualitas model transisi demokrasi terhadap perkembangan zaman, ketajaman dan kelemahan dari konsep utama model transisi demokrasi serta kecenderungan dari arah proses yang terjadi dan model yang dapat dikembangkan.

Pembabakan tulisan ini diawali dengan menguraikan sejarah kemunculan model transisi menuju demokrasi; bagian ini akan menguraikan bagaimana latar waktu kemunculan model ini berhubungan dengan konsep yang diajukan. Berlanjut pada bagian tentang perkembangan kondisi dunia dan penerapan model transisi menuju demokrasi pada kisaran pergantian milenium serta kompatibilitas konsep yang dikandung oleh model transisi menuju demokrasi. Pada bagian akhir mencari bentuk demokrasi yang menjadi sandaran dengan melihat pada kemungkinan yang terpetakan dari kritik atas model transisi menuju demokrasi.

Transisi Menuju Demokrasi: Dari Rustow hingga O'Donnell

Wacana “Transisi menuju Demokrasi” dimulai pada awal dekade 1970-an dengan kemunculan artikel Dankwart A. Rustow yang berjudul, “Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model,” dalam jurnal *Comparative Politics* edisi April 1970. Permasalahan demokrasi dan demokratisasi mencuat dengan adanya perkembangan marksisme di Afrika, keterlibatan militer dalam politik, dan kemunculan kelompok kepentingan di Uni Soviet. Artikel tersebut mencoba menjawab pemecahan permasalahan tersebut dengan pendekatan analitik dan teoritis sebagai alternatif kegamangan kebijakan dan literatur yang ada.²

Asumsi yang berkembang dalam literatur saat itu adalah kesamaan antara faktor pendorong demokrasi dengan faktor yang mendukung kelangsungan demokrasi. Koreksi Rustow adalah dengan mengajukan asumsi bahwa faktor yang menciptakan stabilitas demokrasi berbeda dengan faktor yang mendorong terciptanya demokrasi. Rustow berasumsi, : “*the factors that keep a democracy stable may not be the ones that brought it into existence; explanations of democracy must distinguish between function and genesis.*” Hal ini memberikan sebuah bidang kajian yang berbeda antara demokrasi dengan transisi demokrasi. Analisa transisi demokrasi yang diajukan Rustow menekankan pada tawar-menawar aktor strategis dalam dinamika proses perubahan bukan pada stabilitas dan pelaksanaan fungsi lembaga demokrasi. Dalam skema demikian pusat pengamatan adalah terbukanya ruang konflik kekerasan dan persaingan sekaligus perebutan kekuasaan, dan pilihan yang dimiliki oleh aktor politik yang mempunyai kekuatan menentukan arah demokratisasi di sebuah negara yang mengalami transisi.³

Kondisi yang berkembang di negara kajian pada tahun 1970-an masih jauh dari prakondisi bagi demokratisasi yang mencakup adanya sistem ekonomi dan sosial yang kondusif. Masih rendahnya taraf kemakmuran dengan indikasi pendapatan perkapita dan tingkat pendidikan sebagai bentuk kesadaran politik mendorong Rustow mengabaikan prakondisi dan lebih menekankan pada satu latar belakang yang dinilai olehnya terdapat di banyak negara pra-demokrasi: kesatuan nasional (*national unity*). Faktor tersebut yang merupakan dukungan warga negara pada satu bentuk komunitas politik, yang menurut Rustow, dapat menghasilkan persetujuan yang berujung kompromi atas lembaga politik. Persetujuan tersebut akan berbeda dengan perang saudara. Bentuk persetujuan tersebut yang diajukan sebagai model demokrasi di negara pra-modern, pra-nasionalisme dan tingkat ekonomi yang rendah.

Pada tahap pertama, yang disebut dengan tahap persiapan (*preparatory phase*) persetujuan akan mendahului terbentuknya kompromi dalam wadah lembaga demokratis. Kelompok pendukung demokrasi harus menjadi pelindung bagi kekuatan sosial yang berseteru (*battle*) dalam medan yang luas dan berlangsung dalam jangka waktu panjang. Persetujuan tersebut mencakup medan budaya, kelas sosial, etnis dan agama. Tahap persiapan dapat berlangsung meski dengan adanya keragaman kondisi struktur sosial di negara pra-demokrasi. Keragaman kondisi sosial menurut Rustow tidak signifikan sebagai faktor terjadinya tahap persiapan.

Kelanjutan tahap persiapan adalah sebuah kondisi kebuntuan (*stalemate*) yang terjadi karena elit yang berkuasa kelelahan oleh persetujuan yang berlangsung. Pihak elit tidak memiliki pilihan lain bahwa kepentingan mereka sebaiknya dikompromikan melalui perwujudan lembaga demokrasi dibandingkan melanjutkan persetujuan. Kemunculan demokrasi tidak terjadi serta-merta dengan usainya tahap latar belakang dan persiapan, kemunculan baru terjadi

² Lisa Anderson, “Introduction”, dalam Lisa Anderson (ed.), *Transitions to Democracy*, (Columbia University Press, 1999, <http://www.ciaonet.org/book/anderson/anderson01.html>, 10 May 2004)

³ *ibid*

pada tahap penentuan. Pada tahap penentuan yang menjadi faktor utama bukanlah faktor struktural dan kultural, Rustow lebih menilai faktor pilihan, persepsi, kecenderungan, dan keterampilan tawar-menawar individual di antara elit politik sebagai faktor penting bagi lahirnya demokrasi. Penilaian Rustow tersebut diikuti oleh banyak pihak dari kalangan akademisi dan praktisi dengan menitikberatkan analisa pada pilihan, kecenderungan dan tawar-menawar dibandingkan hambatan, kepentingan, dan perjuangan kelas. Tahap selanjutnya adalah konsolidasi demokrasi yang disebut oleh Rustow dengan *habituation phase*. Konsolidasi berlangsung dengan adanya komitmen dan kepercayaan pada prosedur demokrasi namun juga berkat adanya dukungan luas dari warga negara yang telah menyatu dengan struktur demokrasi yang sedang terbentuk. Pada tahap ini pula berlaku faktor struktural dalam mendukung proses integrasi seluruh komponen bangsa dalam demokrasi baru. Pada tahap ini konsolidasi tidak hanya melibatkan peranan elit namun mencakup seluruh komponen bangsa hingga lapisan massa.

Model Rustow ini kemudian dikembangkan oleh Guillermo O'Donnell dkk. dengan titik berat yang sama pada pola perkembangan transisional.⁴ Perbedaan dari model yang dikembangkan oleh O'Donnell adalah upaya menjadikan demokrasi bukan sebuah determinan dari sebuah perubahan dari rejim otoritarian. O'Donnell melihat sebuah peluang surutnya demokratisasi ke bentuk otoriterianisme baru dalam bentuk yang disebutnya sebagai *democraduras* dan *dictablandas*. Pada bentuk rejim *democraduras* terjadi sebuah pemerintahan yang buruk dengan masih mengandalkan pemilihan umum sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi namun terdapat alienasi

massa yang dibentuk oleh penguasa. Pada rejim *democraduras* O'Donnell masih menganggapnya sebagai bentuk rejim demokratis, sedangkan rejim *dictablandas*, dengan ciri sebuah legitimasi dari pemilihan umum yang cacat dan pembatasan kebebasan politik, O'Donnell menyebutnya sebagai sebuah rejim yang tidak demokratis. O'Donnell dkk. menekankan pentingnya legitimasi rejim melalui pemilihan umum.

Pemilihan umum yang menjamin kebebasan politik meski dilakukan dalam sebuah rejim abu-abu akan dapat menjadi sebuah langkah lepas dari kungkungan rejim otoriter.⁵ Pemilihan umum yang tetap menjamin kebebasan politik merupakan sebuah langkah pragmatis dalam mencegah rejim otoriter untuk kembali berkuasa dan menjaga kelangsungan perkembangan rejim abu-abu ke arah demokratisasi.

Model yang diajukan O'Donnell masih melanjutkan model Rustow dengan mengabaikan faktor struktural. Dengan alasan bahwa perkembangan literatur yang menjadi landasan modelnya tidak mencakup faktor non-politik sehingga modelnya terkesan hanya menekankan aspek politik dari sebuah perubahan rejim. Sementara mengenai faktor ekonomi dalam perubahan rejim O'Donnell mengutip penelitian Adam Przeworski yang menyatakan rendahnya korelasi antara faktor ekonomi dalam proses demokratisasi. Faktor ekonomi terlihat signifikan pada upaya mempertahankan kelangsungan demokrasi.⁶

Meski O'Donnell mengacu pada arah perubahan rejim pasca runtuhnya rejim otoriter yang dianggapnya berbeda dengan model transisi yang dikemukakan oleh Rustow. Kesamaan yang jelas nampak pada upaya memetakan tahapan perubahan rejim dengan

⁴ Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter, and Laurence Whitehead (eds.), *Transition from Authoritarian Rule* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1986)

⁵ Guillermo O'Donnell, "In Partial Defense of an Evanescent 'Paradigm'", (*Journal of Democracy*, Vol. 12 No. 3, Juli 2002), hal. 9

⁶ Przeworski dalam O'Donnell, *ibid*, hal. 10

sedikit perbedaan pada upaya O'Donnell untuk lepas dari determinisme demokrasi. O'Donnell dkk. yang melakukan penelitian pada waktu sesudah Rustow menemukan adanya kemungkinan tahapan rejim abu-abu yang bisa menjadi titik balik ke otoritarianisme atau titik tolak menuju demokratisasi.

“Transisi Demokrasi” di Ambang Milenium Baru

Perkembangan wacana mengenai transisi demokrasi kembali diulas pada tahun 1999 dengan maksud mengenang jejak yang telah dilewati sejak Rustow pertama kali mengeluarkan artikel di *Journal of Democracy*. Dalam kompilasi yang dieditori oleh Lisa Anderson dalam buku yang berjudul “Transitions to Democracy” diulas kembali aktualitas dari teori tentang perubahan rejim.⁷

Ulasan yang diberikan masih mengacu pada dinamika perubahan rejim yang menekankan pada pilihan, kecenderungan dan tindakan elit dengan juga membuka hubungan elit dengan massa. Titik tolak yang menekankan dinamika seperti yang dilakukan oleh Rustow ini masih juga melanjutkan tradisi yang menafikan faktor struktural dalam proses perubahan rejim.

Analisa yang menekankan pada tawar-menawar antar elit dalam sebuah bingkai kelembagaan transisional menjadi salah satu faktor yang disoroti. Peran hubungan antara elit dengan massa dalam bentuk dukungan populis juga dilihat sebagai faktor yang dapat menurunkan peluang pembentukan demokrasi. Meski di sisi lain, dukungan luas dari massa akan dapat meningkatkan posisi tawar bagi elit dalam menghadapi kelompok status quo.

Faktor struktural yang dimunculkan oleh Rustow pada tahap konsolidasi juga dikemukakan kembali sebagai faktor yang berperan. Faktor struktural dapat mejadi penghambat bagi perluasan demokrasi liberal

kepada bentuk pelembagan demokrasi sosial atau yang lebih bersifat partisipatoris. Faktor ekonomi kapitalis disimpulkan sebagai faktor yang mendukung demokratisasi dengan melihat pengaruh konfigurasi kekuatan internasional. Globalisasi dan kapitalisme internasional menjadi salah satu pendorong penyebaran demokrasi liberal dan menurunkan kecenderungan negara untuk mengadopsi model demokrasi sosial. Berhubungan dengan globalisasi, terkait pengaruh elit yang berkuasa terhadap keberhasilan demokratisasi. Kelompok elit yang berkuasa dapat menjadi faktor yang lebih determinan dibandingkan perubahan yang berlangsung dari bawah. Hal tersebut terkait dengan keberadaan faktor eksternal sebagai pengontrol dan pendorong elit yang berkuasa. Faktor eksternal tersebut antara lain dukungan internasional dan efek berantai dari perkembangan demokrasi di kawasan tertentu.

Pencetusan kembali model transisi di pergantian milenium ini juga menyoroti tahap abu-abu. Bentuk demokrasi virtual yang mengacu pada demokratisasi di daerah sub-sahara merupakan temuan bagi kondisi abu-abu. Proses demokratisasi di wilayah tersebut terkait dengan perubahan konfigurasi kekuatan internasional dan perubahan sikap elit yang berkuasa di wilayah itu untuk mendapatkan patron baru. Guna mencapai tujuan tersebut elit yang berkuasa dengan serta merta melakukan perubahan yang terkesan sesuai dengan demokratisasi yang diharapkan negara donor. Pada kenyataan yang terjadi, sebuah proses penghisapan kemakmuran baik dari sumber domestik maupun internasional yang dilakukan oleh elit yang berkuasa yang jauh dari akuntabilitas.

Faktor yang kemunculannya baru dalam tradisi model transisi adalah faktor negara. Peranan negara dalam transisi demokrasi terjalin dalam hubungan kompleks dalam sebuah penentuan bentuk peranan negara yang perlu direposisi dalam konteks perubahan rejim. Dalam kasus yang terjadi di Eropa Timur, peranan negara yang sedemikian besar pada era

⁷ Lisa Anderson (ed.), *Transitions to Democracy*, (Columbia University Press, 1999, <http://www.ciaonet.org/book/anderson/anderson01.html>, 10 May 2004)

rejim komunis perlu direposisi sedemikian rupa sehingga menempati posisi yang jauh lebih minimal dalam mengantisipasi perubahan rejim ke arah yang lebih demokratis. Kondisi ini menimbulkan sebuah biaya perubahan yang tidak sedikit yang terkait dengan dukungan massa kepada elit. Pada titik ini reposisi peran negara juga memunculkan kemungkinan transisi demokrasi di antara varian negara lemah dan negara kuat.

Determinisme dalam Dinamika & Pengabaian Faktor Struktural: Kritik Internal

Model transisi demokrasi sejak dicetuskan oleh Rustow (1970), dengan kelanjutan pada O'Donnell dkk. (eds.) (1986) hingga Anderson (eds.) (1999) memiliki kecenderungan konsentrasi dinamika politik pada tarik-ulur kepentingan diantara elit dengan massa sebagai alat legitimasi. Tarik-ulur yang dalam istilah Rustow disebutkan dengan *battle* yang berujung bila telah dicapai kelelahan di antara elit yang pro status quo dengan elit yang mewakili dukungan massa. Upaya model untuk memetakan tahapan demokrasi berlangsung dari sebuah langkah deterministik pada model transisi Rustow dengan menegaskan demokrasi adalah sebuah solusi yang mungkin dari proses *chaotic* yang "wajar" terjadi dalam transisi rejim. Koreksi atas determinisme berlanjut pada upaya O'Donnell untuk membuka peluang bagi adanya kecenderungan proses demokratisasi untuk mengalami stagnansi atau berbalik arah ke bentuk otoritarianisme. Anderson kemudian menegaskan peran negara yang selama ini diabaikan dalam model transisi, yang bahkan O'Donnell luput memperhitungkan kemungkinan variasi negara kuat-lemah dalam proses transisi rejim. Pada model transisi rejim O'Donnell, transisi rejim diasumsikan terjadi ditengah berfungsinya tugas negara, bukan pada negara yang gagal (*failed states*).

Namun, dari beberapa kasus seperti yang terjadi di Indonesia, transisi diawali dengan

melemahnya fungsi negara (elit yang berkuasa) yang kemudian dilanjutkan dengan upaya oposisi untuk menggoyahkan posisi elit yang berkuasa ditengah semakin lemahnya fungsi negara. Bila di Indonesia penurunan peran negara kemudian di pilih untuk melakukan perubahan dari rejim otoriter, yang sebaliknya terjadi di negara Eropa Tengah dan Timur. Di negara-negara yang sebelumnya kekuasaan negara begitu besar hingga merambah hingga ke berbagai sendi kehidupan pribadi warga negara, upaya untuk mereposisi peran negara dengan menurunkan peran birokrat menjadi dilematis. Penurunan peran birokratis akan meningkatkan *social cost* yang ditanggung oleh massa. Pada kondisi seperti ini terdapat kesempatan elit konservatif untuk menuai perhatian massa dengan mengkritik upaya penurunan peran birokrat.

Anderson dkk. juga melihat konstelasi kekuatan internasional sebagai sebuah faktor yang tidak bisa diabaikan. Tidak lepas dari perkembangan dunia pasca bangkrutnya komunisme, negara Blok Barat mengedepankan demokrasi liberal sebagai model ideal dalam proses transisi rejim. Semangat mengeksplor demokrasi liberal yang dilekatkan pada model transisi memberi peluang model yang seharusnya "ilmiah" kembali terjebak pada sebuah determinisme dengan menempatkan demokrasi liberal sebagai satu-satunya model.

Hal ini bisa dikaitkan dengan keberadaan "*democratic peace thesis*" dalam kajian hubungan internasional yang menjadi program penelitian banyak ilmuwan di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Asumsi dari "*democratic peace thesis*" yakni peluang pecahnya perang di antara sesama negara demokratis lebih kecil dibandingkan peluang terjadinya perang diantara negara demokrasi dengan negara non-demokrasi ataupun negara non-demokrasi dengan sesamanya. Thesis yang berakar dari pemikiran Imanuel Kant ini mendapat tempat luas sesudah bencana dua perang dunia dalam rentang waktu singkat di awal abad 20. Trauma atas perang mendorong sejumlah kelompok ilmuwan untuk

mendorong penyebarluasan demokrasi dan penambahan jumlah negara demokrasi demi mencegah perang dunia yang lebih parah akibatnya. Berdasarkan tesis tersebut kecil peluang bersandingnya negara demokrasi dengan negara non-demokrasi secara damai. Di sisi lain, model demokrasi yang dikembangkan masih terbatas pada pengalaman barat dalam berpolitik sehingga idealisasi demokrasi liberal menjadi kabur.

Sejumlah determinasi yang terjadi sesungguhnya kontradiktif dengan penekanan pada dinamika elit sejak model Rustow yang berlanjut hingga Anderson. Sebuah analisa yang berpegang pada proses dinamika dan aktor seharusnya memberi peluang bagi terbukanya probabilitas yang jauh lebih variatif dibandingkan sebuah analisa struktural yang mengasumsikan berlakunya sebuah "aturan permainan" bagi aktor. Kontradiksi tersebut adalah sebuah determinisme yang terjadi pada sebuah analisa yang berpusat pada agen, sedangkan yang lazim dikritik dengan kecenderungan determinisme adalah analisa yang bersandar pada model struktural.

Pengabaian faktor struktural seperti yang disinggung di beberapa poin diatas justru menimbulkan kelemahan model dengan munculnya faktor-faktor ad-hoc yang cenderung terabaikan. Peranan faktor negara yang baru dikemukakan pada model Anderson merupakan salah satunya. Penekanan peranan elit dan pengabaian kemungkinan terbukannya preferensi elit dengan mengandaikan adanya demokrasi sebagai tujuan- pada model rustow terutama- menjadi salah satu sebab terabaikan peluang terciptanya kondisi abu-abu.

Tak bisa diabaikan model transisi memiliki kegunaan praktis dengan melihat dinamika elit sebagai penentu arah perkembangan rejim dalam sebuah negara. Namun menempatkannya sebagai sandaran saran kebijakan dengan hanya menekankan aspek perebutan kekuasaan dalam wilayah yang luas dan waktu yang tidak terkirakan hanya akan menimbulkan sebuah

anarki dalam ranah politik domestik yang semestinya berlangsung untuk mengacu pada pembentukan legitimasi dan akuntabilitas.

Model Demokrasi dengan Berbagai Kemungkinan Model Ideal: Sebuah Pertanyaan

Demokrasi memiliki banyak wajah seiring dengan berkembangnya ide akan sebuah hubungan antara kebebasan dan ketertiban dalam sebuah komunitas bersama. Tarik ulur antara kebebasan individu dengan kekuatan negara telah lama menjadi sorotan. Pada zaman Yunani Kuno ketika kekuatan massa begitu besar hingga menyebabkan negara tersudutkan dengan kewenangan yang semakin terbatas. Kondisi tersebut terjadi karena lemahnya moralitas dan kepemimpinan yang menggusarkan Plato untuk mengajukan model lain.⁸ Jika pada zaman yang menurut para sejarawan dianggap sebagai zaman tempat demokrasi pertama kali diidealisasikan sebagai model pemerintahan telah mendapat kritik maka di zaman ini pun perlu upaya kritis dalam mentukan titik temu kebebasan dan ketertiban dalam sebuah negara.

Kondisi Indonesia pada tahun 2004 menurut penelitian yang dilakukan oleh lembaga Demos bisa menjadi sebuah potret dari belum dicapainya titik temu antara kebebasan dan ketertiban dalam sebuah negara. Kondisi kebebasan sipil dan politik relatif lebih tinggi dan terjamin dibandingkan era terdahulu. Peningkatan pencapaian aspek esensial demokrasi tersebut tidak dibarengi dengan keberhasilan dalam pembentukan aspek instrumental demokrasi. Masalah hak-hak sosial-ekonomi warga negara, kontrol pemerintahan sipil terhadap militer, perlindungan hak anak, pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi dan partai politik yang bersuara demi konstituen masih menjadi "hutang" dalam sebuah kerja besar demokratisasi di Indonesia. Sehingga bila demokrasi dikaitkan dengan masalah

⁸ Georg Sorensen, *Democracy and Democratization*, (Colorado: Westview Press, 1993), hal. 2

harmonisasi kebebasan dan ketertiban maka hal tersebut, menurut hasil penelitian Demos, menegaskan bahwa demokrasi dan demokratisasi bukan merupakan semata persoalan liberalisasi politik.⁹

Demokrasi telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak lagi bisa berdiri tanpa sebuah ajektifa menemaninya untuk dapat menegaskan sosok dirinya. Namun, menyandingkan sebuah liberalisme sebagai satu-satunya ajektifa yang layak tentu sebuah penafian bagi keluasan demokrasi dan keragaman yang seharusnya dikandung dalam sebuah model demokrasi. Termasuk dalam keragaman adalah kemungkinan pengembangan sebuah model dengan variasi antara kebebasan individu dan kewenangan negara dengan menekankan pada budaya setempat. Eksperimen instrumentalisasi nilai esensial dari demokrasi yang dikandung oleh budaya lokal dapat menjadi sebuah awal dari penemuan demokrasi dengan wajah lokal di berbagai belahan dunia.

Perkembangan demokrasi juga tidak bisa diabaikan dari faktor ekonomi dan budaya. Kondisi ketertinggalan ekonomi negara berkembang yang berujung pada lemahnya kontrol massa terhadap elit dikarenakan masih jauh dari mencukupi kebutuhan dasar. Kondisi ini membuat negara-negara berkembang lebih mementingkan kebutuhan dasar di atas kepentingan perubahan rejim politik.¹⁰ Kritik atas model transisi yang disampaikan oleh Thomas Carothers dalam artikel "*The End of the Transition Paradigm*" antara lain adalah pengabaian model transisi terhadap kondisi khas yang terjadi di masing-masing negara transisi tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada pembentukan dan proses demokratisasi.

Demokratisasi negara dengan ketertinggalan ekonomi telah menjadi perhatian

dengan mulainya upaya pengentasan ketertinggalan ekonomi sebagai prasyarat bagi demokratisasi. Model Rustow dan O'Donnell lahir dari sebuah terobosan dari asumsi prasyarat demokrasi yang terkait dengan faktor sosial dan ekonomi. Dengan mengabaikan untuk sementara, faktor sosial ekonomi tersebut, Rustow mengupayakan pencapaian model politik transisi rejim yang lebih sederhana (*parsimony*). Namun perkembangan globalisasi dan ekonomi dunia tak dapat lagi mengabaikan peran faktor sosial ekonomi. Sedangkan demokratisasi dengan beragam nilai dasar yang dikandung sehingga berbagai negara dengan beragam bentuk demokrasi dapat bersanding dalam sebuah masyarakat internasional.

Hal tersebut hanya sebuah pertanyaan, sesudah kilas balik betapa transisi yang diandaikan dalam model transisi Rustow dan O'Donnell terantuk determinisme sempit.

Daftar Pustaka

- Anderson (ed.), Lisa, 1999, *Transitions to Democracy*, Columbia University Press, <http://www.ciaonet.org/book/anderson/anderson01.html>, 10 May 2004
- Carothers, Thomas, 1996, "Which Democracy?", <http://www.iranian.com/Sep96/opinion/WhichDemocracy/WhichDemocracy.html>, 21 Januari 2005
- Fukuyama, Francis, 1989, "The End of History", *The National Interest* no. 16 1989.
- Guillermo O'Donnell, 2002, "In Partial Defense of an Evanescent 'Paradigm'", *Journal of Democracy*, Vol. 12 No. 3, Juli 2002
- Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter, and Laurence Whitehead (eds.), 1986, *Transition from Authoritarian Rule*, Baltimore, John Hopkins University Press

⁹ Majalah Tempo, *Lembar Sisipan Demos*, 10 Oktober 2004, hal. 60

¹⁰ *ibid*, hal. 11

Haris, Syamsuddin, "Potret Partai dan Masa Depan Demokrasi", Kompas, Senin, 08 September 2003

Majalah Tempo, *Lembar Sisipan Demos*, 10 Oktober 2004.

Sorensen, Georg, 1993, *Democracy and Democratization*, Colorado, Westview Press

Wibowo, I, "Memaafkan Demokrasi? * Sebuah Tanggapan Balik", Kompas, Kamis, 13 November 2003